

# Jurnal JTIK (Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi)

DOI: <https://doi.org/10.35870/jtik.v10i2.5831>

## Penerimaan Masyarakat Jakarta terhadap Citra Polri dalam Lagu "Bayar Bayar Bayar" Karya Band Sukatani

Febriana Indah Syahputri<sup>1\*</sup>, Heidy Arviani<sup>2</sup>

<sup>1\*,2</sup> Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

### article info

#### Article history:

Received 3 October 2025

Received in revised form

20 November 2025

Accepted 10 December 2025

Available online April 2026.

#### Keywords:

Reception Analysis; Stuart

Hall; Police Image; Social

Criticism.

#### Kata Kunci:

Analisis Resepsi; Stuart Hall;

Citra Polisi; Kritik Sosial.

### abstract

This study aims to examine the public reception of the police image in the song "Bayar Bayar Bayar" by the band Sukatani among Jakarta residents, using Stuart Hall's encoding-decoding analysis. The song gained public attention for addressing issues of extortion, bribery, and abuse of power often associated with the police's negative image. This research employs a qualitative method through in-depth interviews with 12 informants from various backgrounds. The analysis reveals two reception positions: dominant-hegemonic and negotiated. In the dominant-hegemonic position, the public fully accepts the song's message as a reflection of social reality. In the negotiated position, the public acknowledges the existence of extortion practices but rejects generalizing such behavior to the entire institution, attributing it instead to individual misconduct. No oppositional position was found. The findings conclude that "Bayar Bayar Bayar" functions more as a reinforcement and affirmation of the police's negative image rather than as a creator of a new one. The song reflects public unease while also opening a space for criticism toward the police institution.

### abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui penerimaan masyarakat Jakarta terhadap citra kepolisian dalam lagu "Bayar Bayar Bayar" karya band Sukatani menggunakan analisis encoding-decoding Stuart Hall. Lagu ini menjadi sorotan karena menyinggung isu pungli, suap, dan penyalahgunaan wewenang yang melekat pada citra negatif polisi. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam, melibatkan 12 informan dari berbagai latar belakang melalui wawancara mendalam. Hasil analisis menunjukkan dua posisi penerimaan, yaitu dominant-hegemonic dan negotiation. Pada posisi dominant-hegemonic, masyarakat sepenuhnya menerima pesan lagu sebagai cerminan realitas sosial. Sementara pada posisi negotiation, masyarakat mengakui adanya praktik pungli, tetapi menolak untuk generalisasi ke seluruh institusi dengan menyebutnya sebagai ulah oknum. Tidak ditemukan posisi opposition. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa lagu "Bayar Bayar Bayar" lebih berperan sebagai penguat dan penegas citra negatif kepolisian dibandingkan sebagai pembentuk citra baru. Lagu tersebut merefleksikan keresahan publik sekaligus membuka ruang kritik terhadap institusi kepolisian.

\*Corresponding Author. Email: [febrianais29@gmail.com](mailto:febrianais29@gmail.com) <sup>1\*</sup>.



Copyright 2026 by the authors of this article. Published by Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

## 1. Pendahuluan

Dalam kehidupan bermasyarakat, kritik memainkan peran penting dalam memperbaiki berbagai aspek, mulai dari seni, pendidikan, hingga politik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kritik dapat diartikan sebagai tanggapan atau kecaman yang terkadang disertai dengan penilaian terhadap kualitas suatu hasil karya atau pendapat. Zaini (2016) berpendapat bahwa kritik adalah bentuk inovasi sosial, sebagai alat untuk menilai gagasan-gagasan lama demi perubahan sosial. Kritik bisa disampaikan melalui berbagai media, baik media massa, forum, maupun karya seni. Salah satu medium yang sering digunakan untuk menyampaikan kritik dan menggambarkan realitas sosial adalah musik. Banoe (2003) dalam Darmawati (2016) menjelaskan bahwa musik adalah cabang seni yang mengatur suara menjadi pola-pola yang bisa dipahami manusia. Musik merupakan ekspresi jiwa dan pemikiran para penciptanya, dan memiliki beragam genre seperti pop, rock, jazz, blues, metal, dangdut, keroncong, dan lainnya. Menurut Murko (1996), seni adalah perasaan indah yang terdapat dalam jiwa manusia, yang diwujudkan melalui alat komunikasi yang bisa ditangkap oleh indra pendengar, penglihatan, atau gerak. Makna seni tidak hanya terbatas pada keindahannya, tetapi juga melibatkan realitas yang ada.

Smieers (2004) dalam bukunya *Art Under Pressure* menjelaskan bahwa seni juga berperan dalam perjuangan sosial, sebagai ekspresi dari berbagai emosi, kemarahan, hasrat, dan kekuasaan yang bisa disampaikan kepada khalayak melalui karya seni. Seiring berjalannya waktu, musik tidak hanya berkembang sebagai bentuk hiburan, tetapi juga sebagai alat untuk menyampaikan aspirasi, kritik terhadap kebijakan, dan berfungsi sebagai kontrol sosial (Zaini, 2016). Salah satu band yang menggunakan musik sebagai alat kritik sosial adalah Sukatani. Sukatani, band new wave punk asal Purbalingga, Jawa Tengah, dibentuk pada Oktober 2022, dengan dua personel: Muhammad Syifa Al Lufti (Alectroguy) sebagai gitaris dan Novi Citra Indriyati (Twister Angel) sebagai vokalis. Mereka tampil dengan ciri khas menggunakan topeng atau balaclava untuk mempertahankan anonimitas. Lagu-lagu Sukatani sering kali membahas isu sosial, mengkritisi ketidakadilan, terutama dalam isu agraria

dan korupsi. Salah satu lagu mereka, “Bayar Bayar Bayar,” yang dirilis pada Juli 2023 dalam album *Gelap Gempita*, menyampaikan pandangan terhadap institusi kepolisian yang identik dengan praktik korupsi, pungutan liar, dan penyalahgunaan wewenang. Lagu ini menjadi kontroversial setelah kedua personel Sukatani mengunggah video permintaan maaf di akun Instagram mereka @sukatani.band. Video ini viral setelah penampilan mereka pada acara Supermusic United Day 8 di Kota Bandung pada 26 Januari 2025. Kontroversi ini berkembang lebih jauh ketika mereka meminta untuk menarik lagu tersebut dari berbagai platform digital (Aprilianto, 2025). Fenomena ini bukan sekadar sindiran, melainkan cerminan dari realitas sosial yang berlangsung. Terutama dalam hal persepsi publik terhadap Polri, yang sudah lama menjadi isu sensitif (Shabrina, 2025). Berbagai kasus pelanggaran serta kinerja kepolisian membentuk citra negatif yang berkembang di masyarakat. Jefkins (1992) menjelaskan bahwa citra adalah kesan yang terbentuk dalam pikiran seseorang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya. Citra ini mencakup gambaran publik terhadap lembaga atau organisasi (Jefkins, 1992). Tagar #kamiBERSAMASUKATANI menjadi viral di media sosial X, diikuti oleh kritik dari para pengguna terkait kekecewaan terhadap aparat kepolisian. Pada Februari 2025, tagar tersebut mencapai lebih dari 7.335 unggahan dan menjadi topik tren (Ayu, 2025). Beberapa kritik dari pengguna menunjukkan penurunan citra aparat kepolisian, seperti “Citra band ini naik, citra parpol makin anjlok,” serta mengungkapkan pandangan negatif “Jualan narkoba, bayar polisi.” Banyak yang juga mengkritik Polri karena diduga menghalangi kebebasan berekspresi dalam kesenian (Ayu, 2025).



Gambar 1. Tagar #KamiBersamaSukatani di media sosial

Tri Siswanti dalam jurnalnya *Normalisasi Stigma Kepolisian Negeri Impian* menyatakan bahwa masyarakat menilai polisi kurang dekat dengan masyarakat dan sering kali meminta uang serta bersikap pamrih (Siswanti, 2020). Citra positif polisi di mata publik sering tercoreng oleh tindakan oknum dalam institusi itu sendiri, sehingga kepolisian mendapat penilaian negatif dari masyarakat (Tolan *et al.*, 2017). Representasi polisi lalu lintas juga sering mendapat pandangan tertentu, terutama ketika masyarakat mengungkapkan pengalaman buruk saat ditindak oleh petugas kepolisian (Rahman & Claretta, 2025). Kompas.com (2025) mencatat bahwa sebagian masyarakat masih kesulitan untuk menghilangkan label bahwa polisi mudah disuap, terutama pada polisi lalu lintas yang menilang kendaraan dan meminta uang. Penelitian yang dilakukan oleh Transparency International (2023) menunjukkan bahwa pandangan masyarakat terhadap kepolisian masih dipenuhi dengan tantangan akibat praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum seharusnya menampilkan citra yang baik di mata masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah diatur dalam undang-undang (Tolan *et al.*, 2017).

Choirul Anam selaku Komisioner Kampolnas menegaskan bahwa reformasi kepolisian sedang berjalan. Dalam konteks pesan yang disampaikan dalam lagu "Bayar Bayar Bayar" milik Sukatani, Anam tidak menyanggah pesan tersebut namun menekankan bahwa keresahan tersebut sedang menjadi fokus internal Polri (Anam, 2025). Resepsi berasal dari bahasa Latin *recipere*, atau dalam bahasa Inggris *reception*, yang diartikan sebagai penyambutan atau penerimaan (Hall, 1980). Pendekatan resepsi berfokus pada atribusi dan konstruksi makna yang berasal dari media pada penerima pesan. Hall (1980) menjelaskan bahwa analisis resepsi menekankan tahapan transformasi yang dilalui oleh pesan melalui media apapun, dari pesan utama yang ingin disampaikan sampai pesan tersebut diterima oleh audiens. Pesan media selalu terbuka dan polisemik (memiliki banyak makna), serta diinterpretasikan sesuai dengan pengalaman dan budaya penerima pesan (Hall, 1980). Resepsi mengacu pada cara pandang terhadap komunikasi massa dari sudut pandang penerima, yang mungkin memahami atau tidak memahami pesan sebagaimana awalnya

disampaikan oleh pembuat pesan (Hall, 1980). Alan P. Merriam dalam bukunya *The Anthropology of Music* menjelaskan bahwa musik melambangkan hal-hal yang berkaitan dengan ide maupun perilaku suatu masyarakat (Merriam, 1964). Koentjaraningrat (1986) menjelaskan bahwa musik adalah bagian dari kesenian, yang merupakan unsur kebudayaan. Boedhisantoso (1982) menambahkan bahwa musik tidak pernah lepas dari masyarakat sebagai kebutuhan manusia secara universal. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Merriam (1964), musik berfungsi sebagai media komunikasi yang memiliki isyarat tersendiri serta penguat norma dan pengatur kontrol sosial. Fungsi musik ini sejalan dengan para musisi di Indonesia yang menggunakan musik untuk menyampaikan aspirasi, pendapat, dan kritik sosial. Akhmad Zaini Abar (2016) menjelaskan bahwa kritik sosial merupakan sindiran atau tanggapan terhadap realitas sosial yang terjadi, terutama ketika kehidupan tidak harmonis dan masalah sosial tidak dapat diatasi. Kritik sosial dapat disampaikan melalui berbagai media, seperti media massa, forum, atau karya seni, untuk memperbaiki ketidakseimbangan dalam tatanan sosial (Abar, 2016).

Musik sebagai media kritik sosial memiliki kemampuan untuk merefleksikan realitas dan menyampaikan kritik terhadap media massa, serta berperan sebagai media ekspresi yang tidak hanya bertujuan untuk hiburan, tetapi juga menyampaikan pesan moral atau nilai-nilai idealisme (Pamungkas & Alfando, 2023). Utan Parlindungan dalam jurnalnya *Mitos Genjer-Genjer: Politik Makna dalam Lagu* menjelaskan bahwa pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, banyak musisi yang menghasilkan kritik sosial melalui lagu-lagu satire (Parlindungan, 2016). Alexander dan Sugiono (2021) dalam jurnal *Musik Protes di Indonesia Pada Era Reformasi: Sebuah Kajian Historis* menunjukkan bahwa musik telah menjadi sarana bagi musisi untuk menentang dominasi kekuasaan pemerintah. Khotibul Umam (2016) dalam jurnal *Musik Dangdut Rhoma Irama Sebagai Media Kritik Politik Pada Orde Baru* menyebutkan bahwa musik telah berfungsi sebagai media ekspresi untuk menarik perhatian massa, melintasi batas etnis, agama, dan bahasa, serta menjadi alat kritik terhadap kekuasaan (Umam, 2016). Frank Jefkins dalam bukunya *Public Relation Technique* menjelaskan bahwa citra adalah kesan yang muncul dalam pikiran individu tentang

sesuatu yang berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka (Jefkins, 1992). Polisi tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum dan pengawasan, tetapi juga harus menunjukkan integritas, profesionalisme, dan keadilan dalam setiap tindakan mereka. Namun, pelanggaran dalam pelaksanaan tugas dan wewenang pada polisi masih banyak terjadi (Burhanudin, 2018). Integritas merupakan kualitas yang menggambarkan kejujuran, konsistensi, dan tanggung jawab terhadap nilai moral dan etika (Burhanudin, 2018). Ketika polisi menjaga integritas, mereka dapat menjalankan tugas dengan profesionalisme, sehingga menghasilkan keadilan bagi masyarakat (Iwansyah & Hoesein, 2025). Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum seharusnya menampilkan citra yang baik di hadapan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah diatur dalam undang-undang (Tolan *et al.*, 2017). Jakarta merupakan kota dengan jumlah pendengar terbanyak untuk band Sukatani. Berdasarkan data dari platform streaming musik Spotify pada 10 Mei 2025, band Sukatani memiliki pendengar terbanyak di Jakarta dengan jumlah 41.960 pendengar. Secara demografi, Jakarta memiliki jumlah penduduk sebanyak 10,61 juta jiwa dan luas wilayah 664,01 km<sup>2</sup> pada 2021, dengan kepadatan mencapai 15.978 jiwa/km<sup>2</sup> (Ahdiat, 2022). Jakarta sebagai ibu kota Indonesia, pusat pemerintahan, birokrasi, dan media, sering terlibat dalam kegiatan yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang. Aktivitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan di Jakarta menjadikan kota ini sebagai tempat dengan kepadatan tertinggi. Lagu "Bayar Bayar Bayar" sempat menjadi lagu tema dalam aksi demonstrasi "Indonesia Gelap" pada Februari 2025 di Jakarta (Girsang, 2025).



Gambar 2. Jakarta sebagai Provinsi Terpadat di Indonesia

Subjek penelitian ini adalah masyarakat DKI Jakarta, karena merupakan pendengar terbanyak dari band Sukatani dan juga ibu kota Indonesia yang merupakan pusat pemerintahan. Kepadatan dan keberagaman kota ini menjadi tantangan besar dalam hal keamanan. Pada tahun 2022, Polda Metro Jaya mencatat tingkat penyelesaian kasus yang rendah, yaitu hanya 5,82% (Khasanah, 2024). Angka ini menjadi lebih serius mengingat ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum. Sementara itu, jumlah kejahatan di Jakarta meningkat sebanyak 58.055 kasus sepanjang tahun 2024 (Rachman, 2024). Beberapa kasus besar terkait penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum kepolisian di Jakarta, antara lain kasus pemerasan terhadap warga negara Malaysia pada acara Djakarta Warehouse Project (DWP) tahun 2024, yang melibatkan banyak anggota polisi dan menunjukkan penyalahgunaan wewenang dalam bentuk pemerasan (DetikNews, 2025). Penyalahgunaan wewenang juga terjadi dalam penanganan kasus pembunuhan anak di Jakarta Selatan, di mana tiga mantan anggota Polres Metro Jakarta Selatan terbukti menerima suap untuk tidak menahan pelaku pembunuhan dan eksploitasi anak (Kompas, 2024).

Penelitian lainnya membahas kondisi sosial dalam lagu "Bayar Bayar Bayar" karya Sukatani. Dalam jurnal *Representasi Kondisi Sosial Dalam Musik Punk: Analisis Wacana Kritis Lirik Lagu "Bayar, Bayar, Bayar"*, Abdul Haris dan rekan (2025) menjelaskan bahwa lagu tersebut menyuarakan pengalaman masyarakat yang sering dihadapkan pada pungutan liar dalam berbagai layanan publik. Lagu ini mencerminkan ketidakpuasan publik serta menekankan eratnya praktik pemungutan liar dalam kehidupan sehari-hari. Lagu tersebut berperan penting dalam menggambarkan kondisi sosial serta menjadi alat perlawanan terhadap ketidakadilan (Haris *et al.*, 2025). Namun, penelitian tersebut berfokus pada media dan pesan dalam lagu tersebut, dan tidak meluas pada penerimaan pesan oleh pendengar lagu "Bayar Bayar Bayar". Penelitian ini menggunakan analisis resepsi menurut Stuart Hall (1980), yang menekankan tahapan transformasi pesan dari pembuat pesan ke penerima pesan. Resepsi mengacu pada cara pandang terhadap komunikasi massa dari sudut pandang penerima, yang bisa saja memahami atau tidak memahami pesan sebagaimana yang awalnya disampaikan oleh pembuat pesan (Hall, 1980).



Penggunaan analisis resepsi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana masyarakat Jakarta memaknai citra Polri dalam lagu “Bayar Bayar Bayar” karya band Sukatani, berdasarkan latar belakang budaya dan sosial mereka. Teori resepsi Stuart Hall lebih relevan dibandingkan teori resepsi lainnya karena penelitian ini berfokus pada fenomena komunikasi massa dan budaya populer. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk institusi kepolisian, khususnya dalam memahami bagaimana masyarakat memaknai citra Polri melalui lagu “Bayar Bayar Bayar” karya Sukatani. Berdasarkan latar belakang tersebut, lagu “Bayar Bayar Bayar” mengangkat kritik terhadap institusi Polri dan menuai kontroversi, terutama terkait citra Polri tentang praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pemungutan liar. Permasalahan ini relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia, di mana banyak kasus serupa terjadi di kota-kota besar. Penelitian terdahulu mengenai citra Polri yang terbentuk di Indonesia sebagian besar masih didasarkan pada analisis media massa. Masalah ini penting untuk diteliti lebih lanjut, karena belum banyak penelitian yang membahas resepsi masyarakat terhadap citra kepolisian di Indonesia melalui media lagu, khususnya lagu “Bayar Bayar Bayar” karya Sukatani. Padahal, musik merupakan salah satu media yang efisien dan efektif dalam menarik perhatian massa yang besar (Abar, 2016).

## 2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Creswell (1998), pendekatan kualitatif adalah proses penelitian dan pemahaman yang dilakukan melalui metodologi yang menyelidiki fenomena sosial dan masalah manusia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan kompleksitas, menganalisis kata-kata, dan menyusun laporan terperinci berdasarkan pandangan responden, serta melakukan studi pada situasi alami (Bogdan & Taylor, 1975). Creswell (2018) menyatakan bahwa penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk memahami fenomena dari sudut pandang partisipan. Pendekatan ini bersifat induktif, menekankan pada makna subjektif yang dialami individu, serta memperhatikan kerumitan permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini

mengadopsi paradigma konstruktivisme, sebagaimana yang dijelaskan oleh Lincoln dan Guba (1985), yang menganggap bahwa setiap individu berusaha memahami dunia sekitar mereka dan membentuk makna subjektif berdasarkan pengalaman pribadi. Dalam penelitian ini, paradigma konstruktivisme digunakan untuk menganalisis resepsi masyarakat terhadap citra Polri dalam lagu “Bayar Bayar Bayar” karya band Sukatani, dengan memperhatikan pengetahuan, interpretasi, dan pengalaman setiap informan. Pendekatan kualitatif deskriptif bertujuan untuk menjelaskan bagaimana resepsi masyarakat dalam membentuk makna terhadap citra Polri yang tercermin dalam lagu tersebut, berdasarkan latar belakang dan pengalaman pribadi mereka. Proses penggalan makna dilakukan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, serta studi pustaka. Penelitian ini difokuskan pada lokasi DKI Jakarta, yang dipilih karena kota ini merupakan pusat pemerintahan dan media, serta memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Penelitian dilakukan pada Mei hingga Juni 2025, dengan tujuan untuk mendapatkan data yang relevan mengenai masyarakat Jakarta yang juga merupakan pendengar terbanyak dari band Sukatani. Objek penelitian ini adalah lagu “Bayar Bayar Bayar” karya band Sukatani, yang mencerminkan citra kepolisian terkait pemungutan liar dan penyalahgunaan wewenang. Jakarta dipilih sebagai lokasi penelitian karena representatif sebagai kota urban dengan masyarakat yang beragam dan relevan dengan topik yang diteliti. Subjek penelitian adalah masyarakat Jakarta dengan kriteria berikut:

- 1) Berdomisili atau aktif di wilayah DKI Jakarta.
- 2) Pernah mendengarkan lagu “Bayar Bayar Bayar” karya Sukatani.
- 3) Memiliki pengalaman interaksi atau opini terhadap institusi kepolisian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi literatur. Untuk analisis data, penelitian ini mengadopsi analisis resepsi yang dikembangkan oleh Stuart Hall (1980), yang mengidentifikasi dua proses utama dalam penyampaian pesan, yaitu *encoding* (pembuatan pesan) dan *decoding* (penerimaan pesan). Dalam konteks penelitian ini, band Sukatani berfungsi sebagai encoder, sementara masyarakat Jakarta sebagai decoder. Proses resepsi membentuk tiga

posisi interpretasi terhadap pesan yang diterima oleh audiens, yang dibagi sebagai berikut:

1) Posisi *Dominant-Hegemonic*

Posisi ini diartikan bahwa informan menerima dan menyetujui citra Polri yang ada dalam lagu “Bayar Bayar Bayar” sebagai refleksi realitas sosial yang sebenarnya.

2) Posisi *Negosiasi*

Dalam posisi ini, informan berkompromi dengan citra Polri yang terkandung dalam lagu tersebut, dengan beberapa hal yang mereka setujui dan beberapa hal lainnya yang mereka anggap tidak sepenuhnya akurat, terutama dalam menggambarkan citra keseluruhan institusi.

3) Posisi *Oposisi*

Posisi ini diartikan sebagai penolakan sepenuhnya terhadap citra Polri yang terdapat dalam lagu “Bayar Bayar Bayar”, di mana informan menilai bahwa lagu tersebut menciptakan citra negatif yang tidak adil.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### Hasil

#### Posisi Penerimaan Pesan Berdasarkan Model Resepsi Stuart Hall

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana masyarakat Jakarta memaknai pesan dalam lagu “Bayar Bayar Bayar” karya Sukatani, khususnya citra kepolisian yang tergambar dalam lagu tersebut. Citra dalam hal ini diartikan sebagai kesan individu atau seseorang terhadap sesuatu yang terbentuk dari pengetahuan dan pengalamannya (Wahid, 2023). Lagu “Bayar Bayar Bayar” muncul sebagai bentuk kritik sosial terhadap praktik pemungutan liar yang dianggap telah mengakar pada institusi kepolisian. Beberapa poin pemungutan liar yang tergambar antara lain pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi), penilangan lalu lintas, touring motor, dan pemberhentian angkutan kota.

*Mau bikin SIM, bayar polisi*

*Ketilang di jalan, bayar polisi*

*Touring motor gede, bayar polisi*

*Angkot mau ngetem, bayar polisi*

*Aduh, aduh, ku tak punya uang*

*Untuk bisa bayar polisi*

Lagu ini menjadi objek penelitian karena liriknya secara eksplisit menggambarkan citra buruk polisi di Indonesia, khususnya terkait dengan integritas dan profesionalisme. Integritas adalah kualitas diri yang mencakup kejujuran, konsistensi, dan tanggung jawab terhadap nilai moral dan etika (Burhanudin, 2018). Dalam hal ini, apabila polisi menjaga integritas, mereka dapat menjalankan tugas dengan profesionalisme, sehingga menghasilkan keadilan bagi masyarakat (Iwansyah & Hoesein, 2025). Lagu ini menggambarkan integritas dan profesionalisme yang hilang melalui praktik penyuapan, represivitas aparat polisi dalam pengusiran rumah, pembabatan hutan, dan penerimaan oleh anggota polisi.

*Mau korupsi, bayar polisi*

*Mau gusur rumah, bayar polisi*

*Mau babat hutan, bayar polisi*

*Mau jadi polisi, bayar polisi*

Wawancara mendalam dilakukan untuk mengungkapkan penerimaan masyarakat Jakarta terhadap citra polisi dalam lagu ini, dengan tujuan menggali persepsi, pengalaman, serta pemaknaan informan terhadap pesan lagu tersebut. Informan-informan yang terpilih adalah masyarakat yang beraktivitas di DKI Jakarta, mendengarkan lagu “Bayar Bayar Bayar” karya Sukatani, serta memiliki opini dan pengalaman terhadap institusi kepolisian. Peneliti tidak hanya berfokus pada pemahaman informan mengenai pesan dalam lagu tersebut, tetapi juga menginterpretasikan pembentukan makna berdasarkan konteks sosial dan budaya yang dimiliki oleh masing-masing informan. Pemaknaan masyarakat Jakarta terhadap pesan dalam lagu “Bayar Bayar Bayar” dianalisis menggunakan konsep resepsi oleh Stuart Hall (1980), yang membagi audiens pada tiga posisi: *dominant-hegemonic*, *negotiated*, dan *oppositional*. Dengan menggunakan konsep ini, dapat dilihat bahwa informan tidak hanya menerima pesan secara pasif, tetapi juga menegosiasikan dan memaknai pesan tersebut sesuai dengan pengalaman dan pandangan pribadi mereka.

#### Posisi Dominan (*Dominant-hegemonic*)

Stuart Hall (1980) dalam model *encoding-decoding* menjelaskan bahwa audiens dapat menerima pesan media sebagaimana dimaksud oleh komunikator. Posisi ini disebut *dominant-hegemonic*, yaitu

penerima pesan (*decoder*) memaknai pesan yang dibuat oleh pembuat pesan (*encoder*) secara penuh dan tanpa adanya penolakan. Pada posisi dominan, pesan yang disampaikan dianggap sesuai dengan realitas yang ada, dan penerima pesan tidak merasa perlu melakukan penafsiran ulang atau penolakan. Dalam penelitian ini, informan yang berada pada posisi dominan menerima pesan dan makna yang ada pada lagu “Bayar Bayar Bayar” sesuai dengan makna yang dibangun oleh Sukatani, serta menganggapnya sebagai realitas sosial yang sebenarnya. Informan memperkuat pandangan bahwa kepolisian tidak memiliki integritas, karena maraknya praktik pemungutan liar, sebagaimana tercermin dalam lirik lagu tersebut. Profesionalisme kepolisian dianggap lemah, dan pelayanan publik sering kali menjadi ajang transaksi dengan polisi. Informan 3, informan 4, informan 5, informan 9, dan informan 12 sepenuhnya menyetujui bahwa penggambaran polisi dalam lagu ini adalah kenyataan, yang identik dengan praktik penyuapan.

Penerimaan tersebut tidak disertai penolakan atau penyaringan ulang, karena informan merasa pandangan tersebut relevan dengan pengalaman pribadi serta pengamatan mereka di Jakarta. Informan 3 dan informan 4 merasa bahwa lagu “Bayar Bayar Bayar” sangat relevan dengan pengalaman mereka. Polisi dipandang sebagai aparat hukum yang menuntut biaya dalam menjalankan tugasnya. Informan 3 menambahkan bahwa lagu ini semakin menguatkan pandangannya terhadap praktik pemungutan liar yang sering ditemui, terutama terkait dengan pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan). Sebelum mendengar lagu “Bayar Bayar Bayar,” informan 3 sudah memandang citra polisi secara negatif, dan lagu ini semakin memperkuat makna bahwa kepolisian sering kali terlibat dalam praktik korupsi. Frank Jefkins (1992) menjelaskan citra sebagai kesan individu terhadap sesuatu yang muncul sebagai hasil dari pengetahuan dan pengalaman mereka. Sejalan dengan Vaitkevičiūtė dan Dobržinskienė (2022), citra polisi terbentuk melalui pengalaman pribadi. Faktor yang mempengaruhi citra tersebut meliputi sifat-sifat pribadi petugas, seperti kesopanan, empati, ketulusan, kompetensi, pengetahuan, dan profesionalisme. Pengalaman informan dengan polisi yang menerima uang semakin membuat pesan dalam

lagu ini terasa lebih realistis dan memperkuat citra negatif institusi kepolisian. Informan 4 menyatakan bahwa keresahan masyarakat terhadap kepolisian sudah banyak disuarakan melalui media sosial dan berita, sehingga lagu ini dapat memvalidasi perasaan tersebut. Pandangan negatif terhadap polisi semakin menguat karena lagu ini, media sosial, dan berita dianggap sejalan dengan realitas yang ada. Lagu “Bayar Bayar Bayar” tidak hanya menjadi media ekspresi, tetapi juga menjadi media untuk menampilkan citra negatif polisi yang telah terbentuk lama di masyarakat. Sejalan dengan pernyataan sebelumnya, informan 5, informan 9, dan informan 12 sepakat bahwa lagu “Bayar Bayar Bayar” sangat menggambarkan citra kepolisian di Indonesia. Menurut informan 5, lagu ini semakin memperkuat pandangan negatifnya terhadap polisi. Lagu ini menggambarkan citra polisi secara keseluruhan sebagai lembaga yang terjerat dengan praktik pemungutan liar. Hal ini menguatkan temuan Abadi (2017), yang menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap polisi semakin menurun karena persepsi negatif terhadap aparat kepolisian. Citra positif polisi sering tercemar oleh perilaku buruk oknumnya.

Informan 9 menyatakan bahwa oknum yang melakukan kecurangan dalam institusi kepolisian lebih banyak dibandingkan dengan yang memiliki integritas. Lagu “Bayar Bayar Bayar” justru tidak mengubah pandangannya terhadap kepolisian; informan tetap memiliki pandangan negatif terhadap polisi, baik ada maupun tidak adanya lagu tersebut. Menurutnya, kecurangan dalam institusi kepolisian telah terjadi dari generasi ke generasi. Pandangan terhadap institusi kepolisian berubah menjadi suatu kegiatan transaksional, meskipun tugas utama polisi sejatinya adalah melayani masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan negatif masyarakat terhadap kepolisian telah turun temurun. Litbang Kompas juga menunjukkan bahwa generasi muda adalah kelompok yang paling skeptis terhadap integritas polisi, terutama dengan pernyataan bahwa “polisi mudah disuap” (Kompas, 2020). Informan 12 merasa bahwa lagu tersebut tidak hanya memvalidasi keresahan yang ada di masyarakat, tetapi juga menggambarkan citra institusi kepolisian. Citra, menurut Jefkins (1992), adalah gambaran atau kesan individu tentang sesuatu yang muncul sebagai hasil dari pengetahuan dan

pengalamannya. Citra ini dapat juga diartikan sebagai perasaan atau gambaran publik terhadap lembaga atau organisasi. Kecurangan yang digambarkan dalam lagu “Bayar Bayar Bayar” dianggap sebagai keresahan kolektif masyarakat. Polemik yang terjadi antara pihak kepolisian dan Sukatani semakin memperkuat bahwa lagu tersebut menggambarkan citra negatif polisi yang sebenarnya. Musik sebagai media kritik sosial memiliki kemampuan untuk merefleksikan realitas dan menyampaikan kritik sosial melalui media massa (Pamungkas & Alfando, 2023). Lagu “Bayar Bayar Bayar” dengan lirik sarkastik dan eksplisit menggambarkan praktik pemungutan liar oleh polisi, menegaskan adanya transaksi yang sudah menjadi rahasia umum. Informan 9 mempertegas bahwa lagu tersebut merupakan hasil kolektif keresahan masyarakat. Menurutnya, hampir setiap orang yang berurusan dengan polisi pasti memiliki pengalaman yang kurang menyenangkan. Informan 4 juga menyatakan bahwa lagu tersebut mewakili realitas, karena informan memiliki pengalaman serupa dengan yang digambarkan dalam lagu “Bayar Bayar Bayar.” Praktik transaksional dengan polisi juga banyak terjadi dalam lingkungan informan 12.

Sebagai contoh, teman informan yang mengalami penangkapan di Tanjung Priok harus membayar sejumlah uang kepada kepala unit kepolisian untuk “menebus” dirinya dan menghindari penahanan. Melalui lagu “Bayar Bayar Bayar” dan pernyataan para informan, pelanggaran dalam pelaksanaan tugas dan wewenang oleh polisi masih sering terjadi. Polisi tidak hanya memiliki fungsi penegakan hukum dan pengawasan, tetapi juga harus menunjukkan integritas, profesionalisme, dan keadilan dalam setiap tindakan yang mereka lakukan (Burhanudin, 2018). Berdasarkan pernyataan informan yang berada pada posisi dominant-hegemonic, lagu “Bayar Bayar Bayar” cenderung menguatkan pandangan mereka terhadap citra polisi yang telah terbentuk negatif. Sebelum mendengarkan lagu tersebut, para informan sudah memiliki pengalaman negatif terkait pemungutan liar, penyalahgunaan wewenang, atau praktik suap. Lagu ini berfungsi sebagai validasi atas pengalaman mereka dan mempertegas pandangan bahwa polisi identik dengan praktik transaksional. Lagu “Bayar Bayar Bayar” merupakan cerminan dari realitas yang ada, sehingga memperkuat ketidakpercayaan pada kepolisian. Hal ini sejalan

dengan fungsi musik menurut Meriam (1964), yang menjelaskan bahwa musik berfungsi sebagai media komunikasi yang menyampaikan isyarat-isyarat tertentu, penguat norma, dan dapat mengatur kontrol sosial. Frank Jefkins (1992) menjelaskan bahwa citra terbentuk berdasarkan pengetahuan dan pengalaman individu. Hal ini terlihat pada informan dalam posisi dominan, yang menyatakan bahwa pengalaman mereka tentang polisi yang menerima suap membuat pesan dalam lagu “Bayar Bayar Bayar” semakin realistis, memperkuat citra negatif Polri. Lagu ini bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga validasi terhadap kesan buruk yang sudah ada. Dengan kata lain, posisi ini menunjukkan keterkaitan pengalaman pribadi masyarakat dengan representasi polisi dalam media lagu, yang semakin memperkuat citra negatif terhadap polisi.

### **Posisi Negosiasi (*Negotiated Position*)**

Model encoding-decoding oleh Stuart Hall (1980) menjelaskan bahwa posisi negosiasi berada di ruang tengah antara penerimaan penuh dan penolakan. Dalam posisi ini, audiens menerima sebagian pesan media namun melakukan penyesuaian dengan pengalaman, kepentingan, dan konteks sosial mereka sendiri. Hall menekankan bahwa audiens bukanlah penerima pasif, melainkan aktor aktif yang menafsirkan pesan berdasarkan kerangka pengetahuan dan budaya yang mereka miliki (Hall, 1980). McQuail (2010) juga menyebut bahwa resepsi bersifat polisemik, yaitu satu teks media dapat menghasilkan berbagai makna karena dipengaruhi oleh konteks sosial dan pengalaman audiens. Polisemik inilah yang menjelaskan mengapa sebagian informan dalam penelitian ini menempatkan diri dalam posisi negosiasi. Pada penelitian ini, posisi negosiasi berarti informan tidak menerima secara penuh makna pesan yang terkandung dalam lagu “Bayar Bayar Bayar”, namun juga tidak menolak sepenuhnya. Informan mencoba untuk melakukan penyesuaian terhadap makna tersebut dengan menambahkan konteks bahwa tidak semua polisi melakukan praktik pemungutan liar, melainkan oknum-oknum tertentu saja. Beberapa informan juga beranggapan bahwa masih ada polisi yang memiliki integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Beberapa informan yang ada pada posisi ini yaitu Informan 1, Informan 2, Informan 6, Informan 7, Informan 8, Informan 10, dan Informan 11.



Informan 1, yang merupakan anggota akademi kepolisian, memberikan gambaran bahwa banyak polisi yang masih menjalankan tugasnya dengan baik, terutama dalam pembuatan laporan tanpa pemungutan biaya. Menurutnya, praktik pemungutan liar yang ada pada lagu “Bayar Bayar Bayar” tidak hanya datang dari pihak kepolisian, namun juga melibatkan partisipasi dari masyarakat. Informan 1 juga menyatakan bahwa sebelum adanya lagu tersebut, citra polisi memang sudah terbentuk secara negatif di masyarakat. Kemunculan lagu ini, menurutnya, menjadi semacam teguran serta masukan bagi institusi kepolisian dari masyarakat. Dia menambahkan bahwa dalam setiap instansi pasti ada oknum yang memperburuk citra institusi tersebut. Frank Jefkins (1992) menjelaskan bahwa citra terbentuk sebagai hasil dari pengetahuan dan pengalaman individu. Informan 1 memperlihatkan bagaimana citra polisi dipersepsikan pada posisi tengah. Di satu sisi, Informan 1 mengakui adanya praktik pemungutan liar yang sesuai dengan isi lagu “Bayar Bayar Bayar”. Namun di sisi lain, ia juga mengingatkan bahwa masih ada banyak polisi yang menjalankan tugas dengan baik, meski sering kali terhalang oleh ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Posisi ini memperlihatkan bagaimana Informan 1 mencoba menjaga keseimbangan antara pengalaman buruk dan idealisme terhadap institusi kepolisian. Informan 2 dan Informan 7 memiliki pandangan serupa dengan Informan 1. Informan 2 menjelaskan bahwa kecurangan yang digambarkan dalam lagu “Bayar Bayar Bayar” adalah ulah oknum di dalam institusi kepolisian. Menurutnya, seorang polisi seharusnya mampu mengayomi dan melindungi masyarakat, namun sering kali oknum polisi melakukan praktik pemungutan biaya untuk pembuatan laporan. Informan 7 setuju bahwa citra kepolisian menjadi buruk karena tindakan oknum polisi di lapangan. Namun, Informan 7 menegaskan bahwa tidak semua polisi melakukan hal yang serupa. Barker dan Carter (1994) menjelaskan bahwa integritas polisi seharusnya berpegang pada norma moral, etika, dan hukum dalam menjalankan tugasnya. Namun, ketika beberapa oknum melanggar norma dengan melakukan pemungutan liar, hal tersebut tentu mencoreng citra institusi secara keseluruhan. Informan 6 juga mencoba

menegosiasikan pesan yang ada pada lagu tersebut dengan cara yang serupa. Menurut Informan 6, lagu “Bayar Bayar Bayar” tepat sebagai kritik terhadap oknum-oknum polisi yang melakukan penyalahgunaan wewenang, namun tidak setuju jika seluruh institusi kepolisian dicap negatif karena beberapa oknum tersebut. Informan 6 berbagi pengalaman mengenai administrasi yang berhadapan langsung dengan polisi, dan menyatakan bahwa ia tidak dimintai biaya tambahan. Meskipun banyak oknum yang melakukan kecurangan, Informan 6 tetap percaya bahwa masih banyak polisi yang memiliki integritas. Sebagai karyawan di bidang kehumasan, Informan 6 menilai bahwa sikap yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap polemik lagu “Bayar Bayar Bayar” masih kurang. Dia berpendapat bahwa dengan adanya lagu tersebut, seharusnya pihak kepolisian melakukan evaluasi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Kepolisian, sebagai lembaga penegak hukum, seharusnya menampilkan citra yang baik di hadapan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah diatur dalam undang-undang (Burhanudin, 2018).

Dalam model encoding-decoding yang dikemukakan oleh Stuart Hall (1980), posisi negosiasi merupakan titik tengah antara penerimaan penuh dan penolakan pesan media. Audiens pada posisi ini tidak menerima pesan media secara sepenuhnya, tetapi juga tidak menolaknya begitu saja. Audiens melakukan penyesuaian pesan dengan pengalaman, kepentingan, dan konteks sosial mereka. McQuail (2010) menyebut resepsi sebagai fenomena polisemik, yang menjelaskan bahwa satu teks media dapat menghasilkan berbagai makna tergantung pada konteks sosial dan pengalaman audiens. Posisi ini mencerminkan bagaimana sebagian informan dalam penelitian ini mencoba menyeimbangkan antara kritik sosial yang ada dalam lagu “Bayar Bayar Bayar” dan pandangan mereka tentang kepolisian. Pada penelitian ini, posisi negosiasi ditandai oleh pengakuan terhadap kritik yang ada dalam lagu tersebut, namun dengan penolakan terhadap penyamarataan bahwa semua polisi terlibat dalam praktik pemungutan liar. Informan yang berada pada posisi ini percaya bahwa tidak semua anggota polisi terlibat dalam tindak pidana tersebut, dan masih banyak polisi yang berintegritas dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Beberapa informan yang berada pada posisi

ini antara lain Informan 1, Informan 2, Informan 6, Informan 7, Informan 8, Informan 10, dan Informan 11. Informan 1, yang merupakan anggota akademi kepolisian, memberikan perspektif yang lebih seimbang. Meskipun ia mengakui adanya praktik pemungutan liar dalam institusi kepolisian, Informan 1 juga menyatakan bahwa banyak polisi yang menjalankan tugas dengan baik, tanpa melakukan pemungutan biaya. Baginya, lagu “Bayar Bayar Bayar” berfungsi sebagai teguran bagi kepolisian, namun ia tidak setuju jika citra seluruh institusi kepolisian dibangun berdasarkan perilaku oknum-oknum tertentu. Informan 1 percaya bahwa di setiap institusi pasti ada oknum yang dapat merusak citra tersebut. Frank Jefkins (1992) menjelaskan bahwa citra terbentuk berdasarkan pengalaman dan pengetahuan individu. Hal ini terbukti pada Informan 1, yang mengakui adanya praktik pemungutan liar namun tetap menekankan bahwa masih banyak polisi yang menjalankan tugas dengan baik dan sesuai dengan norma. Informan 1 berusaha menjaga keseimbangan antara kenyataan yang ada dan harapan ideal terhadap polisi sebagai instansi. Informan 2 dan Informan 7 juga menanggapi lagu ini dengan cara serupa.

Informan 2 menganggap bahwa praktik pemungutan liar yang digambarkan dalam lagu “Bayar Bayar Bayar” adalah perbuatan oknum dari dalam institusi kepolisian. Informan 7 menegaskan bahwa meskipun pemungutan liar sering terjadi, ia tidak sepakat untuk menyamaratakan semua polisi melakukan hal yang sama. Barker dan Carter (1994) menyatakan bahwa integritas polisi harus berpegang pada norma moral dan etika dalam menjalankan tugasnya. Informan 7 percaya bahwa banyak polisi yang berusaha menjalankan tugasnya dengan profesionalisme, meskipun ada oknum yang merusak citra institusi. Informan 6 juga menyatakan bahwa lagu tersebut menggambarkan kritik terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam praktik pemungutan liar, namun ia tidak sepakat jika seluruh institusi polisi dicap dengan label negatif. Pengalaman pribadi Informan 6 dalam berinteraksi dengan polisi tidak menunjukkan adanya pemungutan liar. Namun, Informan 6 percaya bahwa evaluasi internal oleh pihak kepolisian sangat dibutuhkan untuk memperbaiki citra dan membangun kembali kepercayaan masyarakat. Informan 8 menyatakan bahwa lagu ini

mencerminkan *freedom of expression*, yaitu kebebasan untuk mengungkapkan pendapat dalam masyarakat demokratis. Informan 8 mengakui adanya praktik pemungutan liar oleh polisi lalu lintas, namun ia merasa bahwa tidak semua polisi terlibat dalam praktik tersebut. Meskipun demikian, ia merasa bahwa polisi sebagai pelayan masyarakat harus dapat menerima kritik tersebut dengan lapang dada, dan memperbaiki citra mereka di mata masyarakat. Informan 10 dan Informan 11 juga menyetujui bahwa lagu tersebut mewakili keresahan masyarakat. Informan 10, yang bekerja sebagai manajer grup musik, berbagi pengalaman di mana aparat kepolisian meminta biaya keamanan yang tidak transparan untuk acara musik. Namun, Informan 10 menegaskan bahwa tidak semua polisi melakukan hal tersebut dan berharap ada perubahan positif dalam institusi kepolisian. Informan 11, yang juga mengalami pemungutan liar pada razia lalu lintas dan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM), menganggap bahwa lagu tersebut menggambarkan realitas sosial yang dialami oleh banyak orang, tetapi ia tetap meyakini bahwa masih ada polisi yang berintegritas.

Berdasarkan pengalaman para informan di posisi negosiasi, mereka mengakui adanya praktik pemungutan liar yang digambarkan dalam lagu tersebut, namun mereka juga menafsirkan bahwa tidak semua polisi terlibat dalam praktik tersebut. Lagu “Bayar Bayar Bayar” dianggap relevan dengan realitas yang ada, namun informan menekankan pentingnya membedakan antara perilaku individu oknum polisi dan institusi kepolisian secara keseluruhan. Para informan sepakat bahwa meskipun citra kepolisian telah tercoreng oleh beberapa oknum, masih ada ruang untuk memperbaiki citra tersebut dan menciptakan polisi yang ideal, profesional, dan berintegritas. Lagu “Bayar Bayar Bayar” tidak mengubah pandangan para informan secara drastis. Lagu ini mempertegas realitas yang sudah ada di masyarakat, yaitu praktik pemungutan liar oleh polisi. Namun, para informan tetap mempertahankan pandangan bahwa masih ada sisi positif dalam institusi kepolisian yang perlu didorong dan dipertahankan. Meriam (1964) mengungkapkan bahwa musik memiliki fungsi sebagai media ekspresi emosional yang dapat menyuarakan keresahan dan kritik sosial, yang juga diakui oleh para informan dalam penelitian ini.

Tabel 1. Penerimaan Informan Berdasarkan Resepsi Stuart Hall

| No. | Informan         | Pekerjaan                    | Kategori                 |
|-----|------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1.  | Informan 1 (KM)  | Taruna Akpol                 | <i>Negotiation</i>       |
| 2.  | Informan 2 (GR)  | Karyawan Swasta              | <i>Negotiation</i>       |
| 3.  | Informan 3 (JI)  | Karyawan Swasta              | <i>Dominant-Hegemoni</i> |
| 4.  | Informan 4 (FX)  | Karyawan Swasta              | <i>Dominant-Hegemoni</i> |
| 5.  | Informan 5 (WS)  | Karyawan Swasta              | <i>Dominant-Hegemoni</i> |
| 6.  | Informan 6 (AL)  | Karyawan Swasta              | <i>Negotiation</i>       |
| 7.  | Informan 7 (SY)  | Pengemudi Ojek <i>Online</i> | <i>Negotiation</i>       |
| 8.  | Informan 8 (DM)  | Wirausahawan                 | <i>Negotiation</i>       |
| 9.  | Informan 9 (RK)  | Jurnalis Musik               | <i>Dominant-Hegemoni</i> |
| 10. | Informan 10 (JA) | Manager Band                 | <i>Negotiation</i>       |
| 11. | Informan 11 (CT) | Mahasiswa                    | <i>Negotiation</i>       |
| 12. | Informan 12 (RA) | Mahasiswa                    | <i>Dominant-Hegemoni</i> |

### Relevansi Lagu “Bayar Bayar Bayar” dengan Isu Sosial Aktual

Lagu “*Bayar Bayar Bayar*” karya Sukatani, yang berfokus pada kritik terhadap praktik pemungutan liar dalam institusi kepolisian, tidak hanya sekedar karya seni, tetapi juga merefleksikan isu sosial yang lebih besar dalam masyarakat Indonesia. Seiring dengan berbagai peristiwa sosial dan politik yang terjadi, lagu ini semakin relevan sebagai bentuk kritik terhadap penyalahgunaan kekuasaan, terutama oleh aparat kepolisian. Kritik dalam lagu tersebut, yang mencakup pemungutan liar dalam berbagai situasi seperti pembuatan SIM, penilangan lalu lintas, serta tindakan polisi dalam penggusuran dan pembabatan hutan, mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap praktik korupsi dan pelanggaran yang terjadi dalam tubuh kepolisian. Salah satu contoh fenomena sosial yang memperkuat relevansi lagu ini adalah demonstrasi besar-besaran yang terjadi pada akhir Agustus 2025, yang dipicu oleh kebijakan pemberian tunjangan rumah yang tinggi bagi anggota DPR, sementara kondisi ekonomi masyarakat masih sulit. Ribuan orang, mulai dari mahasiswa hingga pekerja, menggelar aksi protes di depan Gedung DPR/MPR untuk menuntut perubahan terhadap kebijakan tersebut. Aksi tersebut berujung pada kerusuhan, yang mengakibatkan jatuhnya korban, salah satunya adalah Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek daring yang dilaporkan tewas akibat tertabrak kendaraan aparat saat kerusuhan terjadi. Polisi menetapkan 959 orang sebagai tersangka setelah kerusuhan itu, sementara 5.858 orang dibebaskan setelahnya. Situasi ini menunjukkan

ketegangan yang semakin memuncak antara masyarakat dan aparat, serta citra kepolisian yang semakin terpuruk di mata publik. Informan 1, yang merupakan anggota Taruna Akademi Polisi (AKPOL), menyatakan bahwa aparat kepolisian yang mengamankan demonstrasi menerima instruksi dari atasan, dan ia melihat kericuhan tersebut sebagai bentuk pertahanan diri oleh aparat. Informan 1 menekankan bahwa kondisi ini memerlukan pembenahan prosedural, karena baik aparat maupun demonstran berada dalam risiko. Meskipun demikian, ia mengakui adanya kebutuhan akan reformasi dalam tubuh kepolisian, sejalan dengan pandangan bahwa citra kepolisian memang telah tercoreng. Sebaliknya, Informan 5 menggambarkan situasi yang lebih buruk, di mana polisi melakukan tindakan brutal terhadap demonstran, seperti melemparkan gas air mata dan batu. Namun, Informan 8 berpendapat bahwa tindakan represif tersebut merupakan upaya aparat kepolisian untuk mempertahankan diri dan menjaga ketertiban, dan bukan representasi dari keseluruhan institusi. Selain itu, fenomena protes terhadap penggunaan sirene pada kendaraan pejabat, dengan tagline “Stop Tot Tot Wuk Wuk”, semakin menambah kesadaran publik akan penyalahgunaan wewenang aparat kepolisian. Dr. Ivanovich Agusta, seorang sosiolog dari Universitas IPB, menjelaskan bahwa fenomena ini merupakan bentuk protes sipil terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pejabat yang menggunakan sirene untuk kepentingan pribadi, terutama saat mengabaikan aturan lalu lintas. Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Agus Suryonugroho, merespons keresahan ini dengan membekukan

sementara penggunaan sirene untuk pengawalan. Informan 5 merasakan bahwa fenomena ini merupakan akibat dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian, yang semakin memperburuk citra kepolisian. Informan 8, meskipun mengakui citra buruk polisi, menekankan bahwa hal tersebut tidak seharusnya menjadi dasar kebencian terhadap seluruh institusi kepolisian. Ia percaya bahwa kritik terhadap polisi harus dibedakan antara kritik terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam pelanggaran dan kritik terhadap institusi secara keseluruhan. Secara keseluruhan, kedua peristiwa demonstrasi penolakan tunjangan DPR dan fenomena protes terhadap penggunaan sirene pejabat memperkuat relevansi "*Bayar Bayar Bayar*" sebagai lagu yang merefleksikan kritik terhadap penyalahgunaan wewenang oleh kepolisian. Seperti yang dijelaskan oleh Meriam (1964), musik memiliki kemampuan untuk menyampaikan kritik sosial dan merefleksikan realitas sosial melalui media massa. Dalam hal ini, lagu "*Bayar Bayar Bayar*" berfungsi sebagai kritik yang bukan hanya berbicara tentang realitas yang ada, tetapi juga memberikan suara bagi masyarakat yang merasa tertindas oleh praktik-praktik yang dianggap tidak adil, terutama dalam interaksi mereka dengan aparat kepolisian. Melalui peristiwa-peristiwa ini, kita bisa melihat bahwa lagu "*Bayar Bayar Bayar*" bukan hanya sekadar lagu, tetapi sebuah pernyataan sosial yang mengungkapkan ketidakpuasan masyarakat terhadap praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang terjadi dalam kepolisian. Lagu ini, bersama dengan fenomena sosial yang menyertainya, menegaskan betapa pentingnya reformasi dalam kepolisian dan bagaimana musik dapat berfungsi sebagai alat untuk menyuarakan keresahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

### Kontradiksi Citra Polisi dalam Konteks Lagu "*Bayar Bayar Bayar*"

Lagu "*Bayar Bayar Bayar*" karya band Sukatani memberikan gambaran yang sangat jelas tentang praktik pemungutan liar, penyalahgunaan wewenang, dan korupsi yang dianggap mengakar dalam tubuh institusi kepolisian. Lagu ini berfungsi sebagai kritik sosial yang merefleksikan ketidakpuasan masyarakat terhadap citra polisi yang selama ini tercipta, terutama dalam hal integritas dan profesionalisme. Media, dalam hal ini lagu, berperan besar dalam membentuk

opini publik dan persepsi terhadap kepolisian. Lagu ini menjadi salah satu contoh representasi negatif kepolisian yang diterima sebagian masyarakat, menguatkan citra buruk yang sudah lama melekat pada institusi tersebut. Citra, menurut Frank Jefkins, adalah kesan yang terbentuk pada individu berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka. Dalam konteks kepolisian, citra yang terbentuk di masyarakat terkait dengan penggambaran polisi dalam lagu ini, mengungkapkan adanya ketidaksesuaian antara citra yang dibangun oleh Polri dan pandangan masyarakat yang sudah terbentuk. Polri, yang berusaha membangun citra positifnya, menghadapi tantangan berat ketika masyarakat melihat praktik pemungutan liar dan korupsi sebagai bagian dari realitas sehari-hari. Pada sisi lain, *The Mirror Image* atau citra bayangan, menjelaskan bagaimana Polri memandang persepsi publik terhadap mereka. Polri sering kali menilai kritik yang datang dari masyarakat hanya sebagai akibat dari tindakan oknum tertentu, bukan gambaran keseluruhan dari institusi. Bahkan, meskipun band Sukatani mengklaim mendapat intimidasi, pihak kepolisian mengungkapkan pandangan yang berbeda, seperti yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit, yang menyebutkan bahwa polemik terkait lagu "*Bayar Bayar Bayar*" hanyalah masalah miskomunikasi antara kepolisian dan band Sukatani. Kapolri juga menekankan bahwa kritik tersebut diterima sebagai masukan untuk evaluasi. Namun, Informan 1, yang merupakan Taruna Akademi Kepolisian (AKPOL), mengungkapkan pandangannya bahwa praktik pemungutan liar masih banyak terjadi di lapangan dan dianggap sebagai masalah sistemik dalam tubuh Polri.

Informan 1 menyebutkan bahwa citra kepolisian di mata masyarakat sudah buruk, dan lagu "*Bayar Bayar Bayar*" semakin memperkuat pandangan tersebut. Hal yang lebih menarik lagi, Informan 1 juga menambahkan bahwa praktik pemungutan liar tidak hanya berasal dari oknum kepolisian saja, tetapi juga dilatarbelakangi oleh "kebutuhan pasar" yang datang dari masyarakat itu sendiri. Citra polisi yang terbentuk dalam masyarakat atau *current image*, berakar pada pengalaman dan pengetahuan yang ada di masyarakat. Sebagian besar informan mengidentifikasi polisi dengan praktik pemungutan liar dan kekerasan, khususnya dari pengalaman mereka dengan Polisi Satuan Lalu Lintas (Polantas). Hal ini terlihat dalam



pengalaman informan yang terlibat dalam razia lalu lintas, di mana pemungutan liar menjadi hal yang sangat lumrah. Informan 6 bahkan menceritakan pengalaman tentang pemungutan liar di acara olahraga dan musik, yang memperburuk pandangan masyarakat terhadap citra kepolisian. Pandangan ini sejalan dengan penelitian Ikhsan, yang menunjukkan bahwa citra polisi semakin meluas di media sosial dengan tagar #PercumaLaporPolisi sebagai tanda ketidakpercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Dalam upayanya untuk membangun citra positif, Polri berusaha tampil sebagai aparat keamanan yang melindungi dan mengayomi masyarakat, sesuai dengan UU No. 2 tahun 2002. Namun, media sering menggambarkan polisi dalam acara televisi dengan citra yang lebih humanis dan profesional, meskipun banyak yang meragukan otentisitas citra tersebut. Informan 6 berpendapat bahwa program-program televisi yang menampilkan polisi dalam peran positif sering kali terkesan tidak autentik dan semakin memperburuk jarak antara kepercayaan masyarakat dengan polisi. Hal ini semakin diperparah oleh lagu "Bayar Bayar Bayar", yang memberikan validasi terhadap ketidakpercayaan publik terhadap polisi dan semakin melebarkan kontradiksi antara citra yang ingin dibangun Polri dengan realitas yang ada di lapangan.

Citra korporat atau *corporate image* Polri, yang seharusnya mencerminkan integritas, profesionalisme, dan keadilan, tampaknya semakin sulit untuk dipertahankan. Informan 9 menyatakan bahwa citra kepolisian di mata masyarakat telah mengakar buruk, dengan lebih banyak oknum yang menyalahgunakan wewenang daripada polisi yang menjalankan tugas dengan integritas. Informan 5 juga merasakan bahwa lagu "Bayar Bayar Bayar" sangat relevan dengan kenyataan yang ada dan mempertegas bahwa meskipun ada polisi baik, jumlah kasus buruk yang terjadi membuat stigma negatif terhadap kepolisian sulit dihilangkan. Kontradiksi antara citra yang ingin dibangun Polri dan citra yang terbentuk di masyarakat terlihat sangat jelas. Lagu "Bayar Bayar Bayar" bukan hanya sebagai media kritik, tetapi juga berfungsi sebagai cerminan keresahan kolektif masyarakat terhadap praktik penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat kepolisian. Lagu ini semakin mempertegas realitas yang ada dan mengafirmasi pengalaman negatif yang dialami masyarakat,

sehingga semakin memperlemah citra positif yang coba dibangun oleh institusi kepolisian. Sebagaimana penjelasan Widiyanto dan rekan, profesionalisme dan peningkatan citra Polri hanya dapat terwujud jika aparat kepolisian menjalankan tugasnya dengan transparansi dan sesuai dengan kode etik yang berlaku.

### Pembahasan

Lagu "Bayar Bayar Bayar" karya band Sukatani mengangkat kritik sosial terhadap citra kepolisian yang banyak diasosiasikan dengan praktik pemungutan liar, suap, dan penyalahgunaan wewenang. Fenomena ini mencerminkan realitas sosial yang ada, di mana banyak masyarakat yang merasa bahwa aparat kepolisian sering kali terlibat dalam transaksi ilegal yang memperburuk citra mereka di mata publik. Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat Jakarta secara umum menerima pesan yang disampaikan dalam lagu ini dengan dua posisi penerimaan utama, yakni posisi dominan-hegemonik dan negosiasi, yang masing-masing menunjukkan bagaimana audiens memaknai pesan yang ada dalam lagu tersebut. Pada posisi dominan-hegemonik, sebagian besar informan menganggap bahwa lagu "Bayar Bayar Bayar" merupakan representasi yang akurat mengenai realitas sosial yang terjadi.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abadi (2017), yang menunjukkan bahwa citra polisi di mata masyarakat Indonesia banyak dipengaruhi oleh pengalaman pribadi dan pandangan yang terbentuk akibat praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum-oknum polisi. Penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap kepolisian tercermin dalam respon masyarakat yang lebih kritis terhadap citra polisi yang berkembang, sebagaimana juga dikemukakan oleh Widiyanto *et al.* (2025), yang menyatakan bahwa masyarakat cenderung semakin skeptis terhadap integritas polisi, terutama di kalangan generasi muda. Namun, meskipun banyak audiens yang menerima pesan lagu secara utuh, terdapat juga segmen yang berada pada posisi negosiasi, di mana mereka mengakui keberadaan praktik pemungutan liar tetapi menolak untuk menggeneralisasi seluruh institusi kepolisian sebagai korup. Penolakan untuk menggeneralisasi ini mencerminkan pandangan yang lebih berimbang, di mana masyarakat masih meyakini bahwa banyak polisi yang menjalankan tugasnya dengan profesional dan

memiliki integritas. Pendapat ini sejalan dengan penelitian Rahman dan Claretta (2025), yang menunjukkan bahwa meskipun citra polisi sering kali tercoreng oleh perilaku oknum-oknum yang melanggar norma, masih ada ruang untuk mengakui kebaikan dan integritas sebagian anggota kepolisian. Namun demikian, tidak ditemukan adanya posisi oposisi dalam penelitian ini, yang berarti tidak ada audiens yang sepenuhnya menolak pesan yang disampaikan dalam lagu tersebut. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam cara audiens memaknai pesan, kritik yang disampaikan dalam lagu dianggap relevan dan memiliki dasar dari realitas sosial yang ada. Fenomena ini mempertegas temuan yang dilakukan oleh Jefkins (1992), yang menyatakan bahwa citra polisi terbentuk berdasarkan pengetahuan dan pengalaman pribadi, serta interaksi langsung dengan aparat di lapangan. Dalam hal ini, pengalaman pribadi masyarakat dengan aparat kepolisian menjadi faktor utama dalam membentuk persepsi mereka terhadap institusi tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun lagu "*Bayar Bayar Bayar*" mempertegas citra negatif yang sudah ada mengenai polisi, lagu tersebut juga berfungsi sebagai alat untuk menyuarakan keresahan masyarakat dan mendorong refleksi terhadap praktik-praktik yang merusak citra institusi kepolisian. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan (2022), yang menunjukkan bahwa citra polisi di media sosial semakin negatif akibat tindakan kontraproduktif yang dilakukan oleh oknum polisi, lagu ini berfungsi sebagai kritik yang sah dan menjadi bagian dari gerakan sosial untuk menuntut perubahan dalam kepolisian Indonesia. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa "*Bayar Bayar Bayar*" tidak hanya sekadar lagu kritik, tetapi juga cerminan dari ketidakpuasan publik terhadap institusi kepolisian. Lagu ini memperkuat kritik terhadap praktik pemungutan liar yang terjadi di lapangan dan membuka ruang untuk diskusi tentang perbaikan citra polisi, yang tentunya sangat penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut.

#### 4. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerimaan masyarakat Jakarta terhadap citra Polri

dalam lagu "*Bayar Bayar Bayar*" karya band Sukatani, dengan menggunakan pendekatan analisis resepsi Stuart Hall. Lagu tersebut memunculkan kontroversi publik karena dianggap menyinggung praktik pemungutan liar, penyalahgunaan wewenang, dan korupsi yang melekat pada citra kepolisian. Melalui penelitian ini, masyarakat Jakarta tidak merespons secara seragam, melainkan beragam sesuai dengan pengalaman, latar belakang, dan kerangka pengetahuan yang mereka miliki. Keberagaman penerimaan tersebut dikelompokkan ke dalam tiga posisi resepsi oleh Stuart Hall, yaitu posisi dominant-hegemonic, posisi negotiation, dan posisi oppositional. Namun demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa hanya dua posisi yang benar-benar muncul, yaitu dominant-hegemonic dan negotiation. Posisi oppositional sama sekali tidak ditemukan pada masyarakat Jakarta yang menjadi subjek penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, masyarakat masih mengakui relevansi kritik yang disampaikan dalam lagu tersebut, meskipun ada perbedaan dalam penerimaan mereka.

Posisi dominant-hegemonic, masyarakat Jakarta menerima pesan lagu "*Bayar Bayar Bayar*" secara penuh sesuai dengan maksud penciptanya. Mereka menilai bahwa citra kepolisian yang digambarkan dalam lagu tersebut yaitu korup, transaksional, dan sering kali menyalahgunakan wewenang. Gambaran tersebut merupakan cerminan dari realitas sosial yang ada. Penerimaan tersebut bukan hanya bersifat aktif, karena berdasarkan pengalaman langsung masyarakat yang kerap berinteraksi dengan aparat kepolisian di jalan, baik saat mengurus surat izin, maupun dalam proses hukum tertentu. Masyarakat Jakarta yang berada pada posisi negotiation menanggapi lagu ini dengan dua pandangan. Mereka mengakui bahwa praktik pemungutan liar, suap, dan penyalahgunaan wewenang memang nyata terjadi di lapangan, namun menolak untuk menggeneralisasi bahwa seluruh polisi memiliki citra buruk. Terdapat perbedaan antara "oknum" dengan institusi kepolisian secara keseluruhan. Masyarakat di posisi ini tidak menolak kritik dalam lagu tersebut, tetapi mereka tetap menyisakan ruang bagi citra ideal kepolisian yang seharusnya profesional, berintegritas, dan mampu mengayomi masyarakat. Penelitian ini tidak menemukan adanya masyarakat Jakarta yang berada pada posisi opposition. Tidak ada informan yang

secara tegas menolak pesan lagu “Bayar Bayar Bayar” atau menganggap bahwa kritik dalam lagu tersebut keliru sama sekali. Ketiadaan posisi opposition ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat memiliki pandangan yang berbeda dalam penerimaan, kritik yang disampaikan lagu dianggap memiliki dasar realitas dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Lagu “Bayar Bayar Bayar” memperkuat kontradiksi yang ada antara citra kepolisian yang ingin dibangun Polri dengan citra yang lekat di masyarakat. Polri berupaya menampilkan citra harapan atau wish image sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Namun pengalaman masyarakat lebih banyak membentuk current image yang negatif, yaitu polisi identik dengan pemungutan liar, penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Lagu “Bayar Bayar Bayar” karya Sukatani juga memperkuat citra negatif tersebut karena liriknya yang relevan dengan pengalaman nyata masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa citra majemuk yang dimiliki Polri kemudian digeneralisasi masyarakat menjadi citra negatif. Lagu tersebut berfungsi sebagai refleksi kolektif atas keresahan terhadap kepolisian, serta mempertegas bahwa komunikasi citra positif Polri belum selaras dengan tindakan nyata aparat di lapangan.

## 5. Daftar Pustaka

- Abadi, M. T. D. (2017). Peran Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Manajemen Komunikasi Publik. *CHANNEL: Jurnal Komunikasi*, 5(2).
- Abar, A. Z. (2016). *Kritik sosial, pers, dan politik Indonesia*. Unisia, 17(32). <https://doi.org/10.20885/unisia.v0i32.5857>.
- Alexander, A., & Sugiono, S. (2021). *Musik protes di Indonesia pada era reformasi: Sebuah kajian historis*. *Jurnal Kajian Seni*, 8(1), 67. <https://doi.org/10.22146/jksks.66305>.
- Burhanudin, A. A. (2018). *Peran etika profesi hukum sebagai upaya penegakan hukum yang baik*. *El-Faqih Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 4(2).
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Los Angeles: SAGE Publications, Inc.
- Ghassani, A., & Nugroho, C. (2019). Pemaknaan rasisme dalam film (analisis resepsi film Get Out). *Jurnal Manajemen Maranatha*, 18(2), 127-134.
- Guna, O. K., Cardiah, T., & Zahra, M. F. A. (2020). Redesain Museum Seni Rupa Dan Keramik. *eProceedings of Art & Design*, 7(2).
- Hall, S., Hobson, D., Lowe, A., & Willis, P. (2003). *Culture, media, language*. Taylor & Francis e-Library. <https://doi.org/10.4324/9780203381182>.
- Haris, A., Samni, A. S., Togatorop, J., Nasution, J., & Daulay, M. A. J. (2025). *Representasi kondisi sosial dalam musik punk: Analisis wacana kritis*. *Jurnal Manajemen Pendidikan, Sosial, Ilmu Pengetahuan, dan Agama*, 2(1). <https://doi.org/10.57235/mesir.v2i1.5635>.
- McQuail, D. (2010). *McQuail's mass communication theory*. Sage publications.
- Merriam, A. P. (1964). *The anthropology of music*, 10(1). <https://doi.org/10.2307/924202>
- Pamungkas, F. P., & Alfando, J. (2023). *Musik sebagai media kritik sosial (Analisis semiotika lagu Peranti karya musisi lokal J & a Harmoni)*. *eJournal Ilmu Komunikasi*, 11(4), 176–189.
- Parlindungan, U. (2016). *Mitos Genjer-Genjer: Politik makna dalam lagu*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 17(3), 236. <https://doi.org/10.22146/jsp.13083>.
- Prawoto, A. (2012). *Aktualisasi netralitas Polri dalam PEMILUKADA guna meningkatkan pendidikan politik dan lambang ketahanan nasional*. Lemhannas RI.
- Rachman, F. (2024). *Sepanjang 2024, jumlah kejahatan di Jakarta meningkat 2%*. Jakarta.

- Rahman, A. R., & Claretta, D. (2025). *POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN KEKERASAN DI MEDIA (SEBUAH ANALISIS WACANA)*. Syntax Idea.
- Rahmani, N. P., & Sitanggang, H. (2025). *Kapolri buka suara soal permintaan maaf band Sukatani*. Antara News.
- Raihan, A. (2017). *Representasi Citra Polisi Lalu Lintas dalam Acara 86 NET* (Doctoral dissertation, State University of Surabaya).
- Ramadhan, R. R. (2025). *Framing media, kebebasan ekspresi, dan sistem politik pada pencabutan lagu Bayar Bayar Bayar*. 02(03), 850–854.
- Rusnianto, A. C. (2016). *Musik Sebagai Media Kritik Sosial (Analisis Lagu Karya Grup Band Simponi)* (Bachelor's thesis, FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1437 H/2016 M).
- Sari, I. M. (2020). *The online media practice in covering Indonesian National Police's prevention efforts on the prohibited party's ideology spread in Indonesia*. IJELTAL (Indonesian Journal of English Language Teaching and Applied Linguistics, 5(1), 149. <https://doi.org/10.21093/ijeltal.v5i1.632>.
- Siswanti, T. (2020). Normalisasi stigma kepolisian negeri impian. *Jurnal Sociopolitico*, 2(2), 89–99. <https://doi.org/10.54683/sociopolitico.v2i2.29>.
- Tolan, C. A., Mingkid, E., & Kalesaran, E. R. (2017). *Peranan komunikasi dalam membangun citra polisi Republik Indonesia (POLRI) pada masyarakat*. *Acta Diurna*, 6(1), 1–12.
- Umam, K. (2016). *Musik dangdut Rhoma Irama sebagai media kritik politik pada Orde Baru tahun 1977–1983*. *Avatara*, 4(3), 1002–1012.
- Vaitkevičiūtė, K., & Dobržinskienė, R. (2022). Factors forming the image of the police officer. *Public Security and Public Order*, 29(29), 220–230. <https://doi.org/10.13165/PSPO-22-29-32>.
- Virganata, R. (2017). *Musik dan kemampuan komunikasi siswa SMP: Studi seorang siswa kelas XI SMP Negeri 35 Surabaya*. Digilib UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Wahid, A. (2023). Strategi Membangun Citra dan Kinerja Lembaga. *Pati: Fatiba Media*.
- Widiyanto, A. P., et al. (2025). *Analisis peran etika dan profesionalisme polisi sebagai penegak hukum dalam menjaga kepercayaan masyarakat: Studi kasus Ferdy Sambo*. 2(5), May.
- Wulandari, T. (2025). *Protes 'Stop Tot Tot Wuk Wuk', Pakar IPB: Potensi pembangkangan sipil*. Detik.com.
- Yuliansyah, M. (2015). *Musik Sebagai Media Perlawanan Dan Kritik Sosial (Analisis Wacana Kritis Album Musik 32 Karya Pandji Pragiwaksono)*.